

INDONESIAN DIPLOMACY AT THE ADMM-Plus (ASEAN DEFENSE MINISTERS MEETING) IN THE PHILIPPINE IN COUNTERACTING THE THREAT OF TERRORISM IN 2017

Oleh : Mirna Rosadi

mirna.rosadi1996@gmail.com

Pembimbing : Dr. M. Saeri, M.Hum

Bibliografi : 18 Journals and Working Papers, 24 Books, 9 Official Documents, 12 Websites

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this study is to understand why Indonesia has taken diplomatic action at the ASEAN DEFENSE MINISTERS MEETING-Plus session in the Philippines in 2017. Does Indonesia as a country that also has security disruptions want to cooperate with other ASEAN member countries to counteract regional threats that often happened specifically terrorism. According to the results of the ADMM meeting in the Counter Terrorism Working Group discussion, the Southeast Asian region is in the threat of terrorism such as the latest threat of terrorism in the Philippines and Indonesia and needs repression through a plan of action by the ASEAN Security Community (ASC). This research theoretically uses a realist perspective and uses the diplomatic theory of S.L. Roy. The formulation of all arguments, facts, and theoretical frameworks in this study is guided by the method of qualitative explanation. The technique in this study is through literature. Data obtained and collected from the official website of the ASEAN National Secretariat and the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (KEMHANRI), journal books, theses and then from the internet are related to the problem. This study found that at the 4th ADMM-plus Meeting in 2017, the Minister of Defense of the Republic of Indonesia exchanged views on terrorism and extremism, maritime security, non-proliferation nuclear weapons, cyber security and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). So on this basis, the Indonesian Minister of Defense, Ryamizad Ryacudu proposed an intelligence-based cooperation called "Our Eyes Initiative". Indonesia proposed this collaboration in the interest of increasing influence in Southeast Asia as a leader in regional security.

Keywords : ASEAN, ADMM, Regional Security, Diplomacy, Terrorist, Our Eyes, Initiative

Pendahuluan

ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya sekaligus untuk memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan regionalnya. ASEAN mempunyai 3 pilar kerjasama, yaitu Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial dan Budaya¹.

Pilar Politik dan Keamanan ASEAN adalah bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan Demokrasi². *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM) merupakan Salah satu bentuk dari Pilar Politik dan Keamanan ASEAN yakni Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN³. ADMM merupakan *platform* kerja sama antar- Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan *Confidence Building Measures* (CBM) serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama praktis. ADMM-Plus merupakan bentuk perluasan kerja sama Pertahanan ADMM dengan melibatkan 8 (delapan) Negara Mitra Wicara ASEAN, yakni Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat

Tiongkok (RRT), Jepang, Republik Korea (ROK), Selandia Baru, India dan Rusia⁴.

Rencana dari Aksi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community / ASC*) yang di angkat pada KTT ASEAN ke -10, menetapkan bahwa ASEAN akan menyelenggarakan agenda forum tahunan yaitu *ASEAN Defence Ministers Meeting* (ADMM). Sejak pelaksanaan *The Inaugural Meeting of ADMM* di Kuala Lumpur, Mei 2006, dan *The Inaugural ADMM-Plus* di Ha Noi, Oktober 2010, telah banyak kemajuan yang dicapai oleh ADMM dan ADMM-Plus, mulai dari kerja sama *capacity building*, pembangunan rasa saling percaya, hingga kerja sama yang bersifat praktis dan konkret seperti peningkatan koordinasi dan interoperabilitas antar personil pertahanan dan militer negara-negara anggotanya. Dalam rangka mengimplementasikan kerja sama , dibentuklah sejumlah *ADMM-Plus Experts' Working Groups* (EWGs) pada 7 (tujuh) area yang telah disepakati bersama, antara lain: *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR), *Military Medicine* (MM), *Counter Terrorism* (CT), *Maritime Security* (MS), *Peacekeeping Operations* (PKO), *Humanitarian Mine Action* (HMA), *Cyber Security* (CS)⁵.

ADMM juga bertukar pandangan mengenai masalah Keamanan dan Pertahanan Regional dan Internasional. Beberapa fokus utama selama pertukaran pandangan berlangsung gerakan dan ekstremisme terus melancarkan aksinya di wilayah kedaulatan negara ASEAN baik dalam keamanan maritim, non-proliferasi nuklir senjata dan keamanan *cyber*. Pertemuan menyepakati bahwa munculnya kelompok ekstrimis dan teroris tidak hanya masalah dari beberapa negara tetapi seluruh wilayah. Pertemuan itu juga

¹<http://setnas-asean.id/pilar-politik-dan-keamanan> Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia. Diakses pada 18 Februari 2018, pk. 20:21

² Ibid

³<http://setnas-asean.id/asean-defence-ministers-meeting-admm> Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia. Diakses pada 18 Februari 2018, pk. 21:43

⁴<https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html> ASEAN Defence Ministers Meeting website diakses pada 20 Maret 2018, pk. 14:54

⁵ Ibid

mengungkapkan komitmen yang kuat untuk berkontribusi dalam memberantas kelompok ekstrimis dan di upaya deradikalisasi untuk mencegah proliferasi kelompok-kelompok seperti itu.

Filipina menghargai dukungan pada pertemuan ADMM-Plus, pertemuan ini menginformasikan pernyataan para Menteri Pertahanan ASEAN tentang melawan Kekerasan Ekstremis, Radikalisasi, dan Gerakan yang dikeluarkan pada pertemuan yang diadakan pada 23 Oktober 2017 dimana para menteri sepakat untuk melakukan pendekatan untuk saling berbagi informasi intelijen yang lebih kuat pada gerakan teroris dan pendanaan teroris serta mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat sipil dan institusi lainnya dalam memerangi gerakan dan ekstremisme.

Penulis menggunakan **Perspektif Realis**, dimana hubungan internasional ditandai dengan anarkisme, dimana segala cara akan dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional suatu bangsa. Serta dalam perspektif realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup, berperan dan bertindak secara rasional dan tindakan-tindakannya berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional⁶. Perspektif Realis memiliki asumsi dasar, Asumsi dasarnya dalam perspektif realisme memandang negara sebagai aktor tunggal, dimana sebuah negara menghadapi dunia luar sebagai sebuah unit terintegrasi untuk mengambil sebuah kebijakan, status ini tidak dapat

dimiliki oleh aktor lainnya (aktor non negara). Negara sebagai aktor rasional dalam situasi pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapabilitas negara⁷. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Asumsi kedua ialah pendekatan politik dan keamanan dengan cara menilai fungsi dan kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri, Asumsi ketiga ialah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Dalam penelitian ini yang bertindak ialah negara yang memiliki *power* untuk mencapai kepentingan nasional tersebut melalui kebijakan negara.

Dalam penelitian untuk menentukan tingkat analisa maka diperlukan level analisa yang tepat yang akan membantu memahami objek permasalahan. Sebelum menentukan level analisa, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan unit analisis dan kedua unit eksplanasi. Unit analisis merupakan variabel dependen yang hendak dijelaskan. Sedangkan unit eksplanasi merupakan variabel independen yang perilakunya hendak diamati. unit analisis dalam penelitian ini adalah Diplomasi Indonesia pada Sidang ADMM-Plus di Filipina dalam menangkal ancaman gerakan di kawasan asia tenggara dan unit eksplanasi adalah penjelasan mengenai Apa yang Indonesia diplomasikan pada sidang ADMM-Plus di Clark, Filipina pada tahun 2017. Menurut Mochtar Mas'ood ada lima kategori menentukan level/tingkat analisa dalam studi hubungan internasional, yakni:

⁶ M. Saeri, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatis*. Dalam Jurnal Transnasional Vol. 03 No. 02, Februari 2012. Pekanbaru. Hal 568

⁷ Ibid, Hal 569-570

Perilaku Individu, Perilaku Kelompok, Negara-Bangsa, Sistem Internasional⁸.

Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Negara**. Penelitian ini menggunakan level analisa negara-bangsa. Negara diartikan sebagai integrasi kekuasaan politik, organisasi kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia didalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat⁹. Sehingga ketika sebuah negara untuk dapat berinteraksi dengan aktor lain harus mendapat pengakuan secara *de-facto* dan *de-jure*. Dalam hal ini yang bertugas sebagai pembuat kebijakan ialah negara-negara anggota ASEAN. Sehingga fokus kajian penelitian ini memastikan pada yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN terhadap aksi gerakan yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Teori adalah suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional sehingga mampu membuat konseptualisasi peristiwa-peristiwa di masa lalu hingga masa kini. Teori berperan membekali peneliti untuk membangun interpretasi terhadap permasalahan yang kompleks dan memberikan cara untuk berpikir kritis, logis, dan integratif¹⁰.

Diplomasi kembali di hidupkan dengan metode-metode yang lebih spesifik sehingga proses diplomasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan total. Sebagai hasil kajian penulis dalam menemukan konsep-konsep mendasar tersebut, maka kajian konsep-konsep yang dimaksud dapat berawal dari analisis kata “diplomasi”, dimana dalam bahasa mutakhir menurut Nicolson, menunjukkan

beberapa pengertian yang berbeda. Diplomasi berarti politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan politik luar negeri, atau cabang dinas luar negeri¹¹. Ada dua aspek utama dari keamanan dari suatu negara, *pertama* pemeliharaan status nasional sebagai suatu negara yang berdiri sendiri dan kemampuan untuk mengatur urusan dalam negerinya. *Kedua*, menciptakan dan memelihara hubungan politik dengan beberapa negara dengan bergabung dalam satu koalisi guna untuk memelihara keadaan negara yang bebas dari rasa takut, terlindungi dan merdeka, Jadi disini jelas bahwa aksi gerakan yang muncul di kawasan Asia Tenggara merupakan suatu ancaman besar bagi negara-negara anggota ASEAN, maka negara-negara Anggota ASEAN merancang pertemuan (*meeting*) guna untuk mengatur pencegahan aksi pergerakan gerakan.

Teori yang penulis gunakan adalah **Teori Diplomasi**. Menurut S.L Roy diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara damai gagal untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan maka diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan¹². Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya¹³. Dalam memahami diplomasi ada banyak sekali elemen dan metoda yang harus dieksplorasi guna menghadirkan pemahaman yang komprehensif dan faktual.

⁸ Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES. 1994), Hal 42-44

⁹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar ilmu politik*, Jakarta; Gramedia pustaka, 2008. Hal 91

¹⁰ Scott Burchill, Andrew Linklater. Teori-Teori Hubungan Internasional, Bandung: Nusa Media. 2008, hal 19

¹¹ Sir Harold Nicolson. 1988. *Diplomacy, Institute for The Study Diplomacy Edition, Washington*. Hal 3-5

¹² S.L Roy, *Diplomasi*, PT. Raja Persada, Jakarta, 1995, hlm. 6

¹³ R.P Barston, *Modern Diplomacy*, Fourth Edition, Routledge: Taylor and Francis Group, London and New York, 2013, hlm. 1

Teori adalah suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional sehingga mampu membuat konseptualisasi peristiwa-peristiwa di masa lalu hingga masa kini. Teori berperan membekali peneliti untuk membangun interpretasi terhadap permasalahan yang kompleks dan memberikan cara untuk berpikir kritis, logis, dan integratif¹⁴.

Diplomasi kembali dihidupkan dengan metode-metode yang lebih spesifik sehingga proses diplomasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan total. Sebagai hasil kajian penulis dalam menemukan konsep-konsep mendasar tersebut, maka kajian konsep-konsep yang dimaksud dapat berawal dari analisis kata “diplomasi”, dimana dalam bahasa mutakhir menurut Nicolson, menunjukkan beberapa pengertian yang berbeda. Diplomasi berarti politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan politik luar negeri, atau cabang dinas luar negeri¹⁵.

Penulis menggunakan **konsep Diplomasi Pertahanan dan Kerjasama Pertahanan**, Begitu luasnya konsep diplomasi pertahanan, ditambah belum adanya teori yang *absolute* dalam menjelaskan diplomasi pertahanan, seringkali menimbulkan kebingungan dan kerancuan antara diplomasi dalam arti luas dengan diplomasi pertahanan secara khusus. Perihal kerancuan secara definitif diantara ke dua konsep tersebut tidak hanya disebabkan adanya kesamaan istilah diplomasi namun juga secara fungsional dan cakupannya¹⁶. Diplomasi pertahanan merupakan keterpaduan antara dua instansi dan disebut pula kerjasama saling menguntungkan antara diplomasi dan

pertahanan (*symbiosis between diplomacy and defense*) dengan cara meningkatkan kerjasama yakni memadukannya dengan masyarakat internasional¹⁷. Diplomasi pertahanan merupakan konsep yang dicetuskan oleh Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik, terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis¹⁸. Istilah diplomasi pertahanan yang digunakan Inggris ini dijelaskan sebagai salah satu kebijakannya yang bertujuan untuk menanamkan pengaruh melalui tindakan-tindakan yang bersifat *low-cost* sebagai salah satu upaya memperkuat kemampuan militer dan teknologinya¹⁹. Diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan mengkombinasikan prinsip dasar antara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang ada²⁰. **Kerjasama pertahanan** dapat dikonotasikan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan di bidang pertahanan. Kerjasama pertahanan sebenarnya bagian dari diplomasi pertahanan (*defense diplomacy*) yaitu bagian dari diplomasi yang berkaitan erat dengan domain pertahanan, termasuk semua dukungan untuk kepentingan pertahanan²¹. Menurut Slaughter, suatu negara dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif apabila adanya kerjasamadengan negara lain secara aktif. Kemampuan suatu negara

¹⁴ Scott Burchill, Andrew Linklater. Teori-Teori Hubungan Internasional, Bandung: Nusa Media. 2008, hal 19

¹⁵ Sir Harold Nicolson. 1988. *Diplomacy, Institute for The Study Diplomacy Edition, Washington*. Hal 3-5

¹⁶ Steiner, B. (2004). *Diplomacy and International Theory*. UK: Cambridge University Press. Hlm. 493-509

¹⁷ Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 166

¹⁸ Corcoran, A. J. (2003) *Assessing the Effectiveness of Defence Diplomacy*. Defense Science and Technology Laboratories, hlm. 37

¹⁹ Mulloy, G. (2007). *Japan's Defense Diplomacy and Cold Peace in Asia*. Asia Journal of Global Studies Vol. 1 hlm. 5

²⁰ Hidayat, S. (2014). *Diplomasi Pertahanan Indonesia : Amalgam Militer-Sipil*. Jurnal Pertahanan : Diplomasi Pertahanan, Volume 4 No. 2, hlm. 31

²¹ Mangindaan, R. (2013) *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif*. Diunduh dari Forum Kajian Pertahanan Maritim : <http://www.fkpmaritim.org/> pada 13 Desember 2018

menjalin kerjasama merupakan bentuk baru kedaulatan negara dimana negara secara efektif dan partisipatif dalam bekerjasama di forum dan jaringan internasional. Dalam konteks internasional, kerjasama pertahanan dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu kerjasama bilateral dan multilateral. Menurut Slaughter, kerjasama pertahanan meliputi beberapa hal yakni *joint charter* antara militer atau sipil dalam sektor kapabilitas, penyatuan suplai kapabilitas militer yang berguna dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan, pengadaan bersama dan pembagian kapabilitas militer, kerjasama operasional terintegrasi, spesialisasi peran dan tugas dalam konteks kerjasama struktural permanen. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran ADMM sebagai salah satu pilar politik dan keamanan asean dalam menghadapi dan memberantas terorisme. Maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Mengapa Indonesia melakukan tindakan Diplomasi melalui Forum ADMM-Plus di Filipina ?”**.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian dirumuskan untuk menjelaskan Forum kerjasama dibawah Pilar Politik dan Keamanan ASEAN yang biasa dilakukan oleh negara-negara anggota dan non anggota yang disebut sebagai ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM).

2. Memberikan gambaran mengenai Kerjasama Intelijen “Our Eyes” dalam menghadapi tindakan Gerakan di kawasan ASEAN.

3. Menggambarkan dan menjelaskan Kerjasama Intelijen “Our Eyes” yang di cetuskan oleh Menteri Pertahanan RI, dan menganalisis lebih lanjut kebijakan kerjasama Intelijen terhadap Tindakan Gerakan.

Data-data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan menggunakan teknik wawancara yang diperoleh dari sumber langsung yaitu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu teknik pengumpulan data dengan cara riset perpustakaan. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku, majalah, surat kabar, buletin, inetrnet dan sumber lainnya yang sesuai dengan ruang lingkup dalam penelitian.

PERKEMBANGAN ANCAMAN KEAMANAN DI ASIA TENGGARA

ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya sekaligus untuk memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan regionalnya. ASEAN mempunyai 3 pilar kerjasama, yaitu Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial dan Budaya.

Pilar Politik dan Keamanan ASEAN adalah bentuk kerjasama yang ditujukan untuk memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk untuk memasyarakatkan nilai-nilai bersama seperti HAM dan Demokrasi . ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) merupakan Salah satu bentuk dari Pilar Politik dan Keamanan ASEAN yakni Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan dan rasa saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN .

Sejarah panjang terkait dengan relasi konfliktual yang ada diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara,

khususnya negara-negara besar didalamnya tidak serta merta hilang pasca terbentuknya ASEAN. Gesekan-gesekan senantiasa terjadi diantara negara-negara besar seperti Indonesia dan Malaysia, Thailand dengan Kamboja dan masih banyak contoh lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mentalitas konflikatif masih cukup kuat melekat kepada perilaku negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perilaku konflikatif tersebut berpotensi besar menimbulkan munculnya konflik bersenjata yang berdampak kepada instabilitas keamanan di dalam kawasan serta memancing masuknya kekuatan-kekuatan asing untuk terlibat dalam konflik tersebut.

Bagi Indonesia, dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kepentingan pertahanan yang ingin dicapai. Oleh karena itu diperlukan sebuah upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan pertahanan tersebut kepada negara-negara di kawasan. Komunikasi ini menjadi sangat penting mengingat kekhawatiran akan terjadinya misinterpretasi dari negara-negara di dalam kawasan terhadap kebijakan pertahanan Indonesia. Hal ini pada akhirnya berpotensi membawa instabilitas keamanan di kawasan terkait dengan timbulnya rasa saling curiga diantara sesama negara di kawasan maupun dengan negara di luar kawasan. Rasa saling curiga tersebut tidak dapat dilepaskan dari mentalitas konflikatif seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2006 dibentuk ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) sebagai mekanisme yang dapat digunakan sebagai wadah komunikasi terkait dengan permasalahan serta kebijakan pertahanan di antara negara-negara Asia Tenggara.

Keberadaan ADMM menjadi salah satu penopang bagi terbangunnya salah satu pilar ASEAN Community yang akan diterapkan pada tahun 2015 yakni ASEAN Political and Security Community (APSC). Salah satu dasar dalam pembentukan

sebuah komunitas dalam kawasan adalah rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan keamanan, unsur utama dalam hal ini adalah rasa saling percaya bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukan ditujukan untuk mengancam negara lain dalam komunitas tersebut. Maka dalam hal ini ADMM memainkan peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar ASEAN Community dalam bidang politik dan keamanan.

ADMM merupakan platform kerja sama antar- Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan Confidence Building Measures (CBM) serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama praktis.

Pembentukan ADMM dimulai pada Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-10, menetapkan bahwa ASEAN akan bekerja menuju pembentukan ADMM tahunan. Pertemuan perdana ADMM diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 09 Mei 2006.

Pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) adalah mekanisme konsultasi dan kooperasi pertahanan tertinggi di ASEAN. ADMM dalam hal ini tidak hanya memiliki signifikansi terhadap keamanan kawasan semata dalam mempercepat kohesi kawasan dan menjaga stabilitas di dalam kawasan. ADMM menjadi sebuah instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan mereka. Demikian pula dengan Indonesia yang melihat bahwa keberadaan ADMM dapat menjadi sebuah instrumen strategis bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi pertahanan secara multilateral baik terhadap seluruh negara di Asia Tenggara maupun terhadap negara-negara di luar kawasan. Berangkat dari hal tersebut, dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai signifikansi ADMM

dalam diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional yang ada dikawasan Asia Tenggara

ADMM-Plus merupakan bentuk perluasan kerja sama Pertahanan ADMM dengan melibatkan 8 (delapan) Negara Mitra Wicara ASEAN, yakni Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Republik Korea (ROK), Selandia Baru, India dan Rusia . Instansi Penjuru (*focal point*) tingkat nasional yang menangani ADMM adalah Kementerian Pertahanan²².

Rencana dari Aksi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community / ASC) yang di angkat pada KTT ASEAN ke -10, menetapkan bahwa ASEAN akan menyelenggarakan agenda forum tahunan yaitu ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM). Sejak pelaksanaan *The Inaugural Meeting of ADMM* di Kuala Lumpur, Mei 2006, dan *The Inaugural ADMM-Plus* di Ha Noi, Oktober 2010, telah banyak kemajuan yang dicapai oleh ADMM dan ADMM-Plus, mulai dari kerja sama *capacity building*, pembangunan rasa saling percaya, hingga kerja sama yang bersifat praktis dan konkret seperti peningkatan koordinasi dan interoperabilitas antar personil pertahanan dan militer negara-negara anggotanya. Dalam rangka mengimplementasikan kerja sama , dibentuklah sejumlah *ADMM-Plus Experts' Working Groups* (EWGs) pada 7 (tujuh) area yang telah disepakati bersama, antara lain: *Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)*, *Military Medicine (MM)*, *Counter Terrorism (CT)*, *Maritime Security (MS)*, *Peacekeeping Operations (PKO)*, *Humanitarian Mine Action (HMA)*, *Cyber Security (CS)*²³.

Kesepakatan ADIC (ASEAN Defence Industry Collaboration) yang disepakati pada Februari 2011,

mempromosikan kolaborasi pertahanan di kawasan ASEAN yang menghasilkan lima area kesepakatan dari kerja sama keamanan: keamanan maritim (MS), pendampingan kemanusiaan dan bencana (HADR), operasi perdamaian (PKO), *counter terrorism* (CT) dan pengobatan maritim (MM). Namun yang menjadi inti dari kerja sama ini adalah pembentukan kerja sama industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista dari negara-negara eksportir senjata seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Rusia. Dengan adanya ADIC, dimungkinkan pengurangan impor pertahanan (*defence import*) dari 25 miliar dollar per tahun hingga 12,5 dollar per tahun²⁴. Dengan kata lain pengendalian dengan cara transaksi menjadi kondisi dasar kerja sama dalam ADIC untuk memberikan manfaat kepada negara anggota ASEAN dalam membangun kapasitas menghadapi tantangan keamanan²⁵.

TUJUAN ADMM DAN ADMM-Plus

Tujuan dari ADMM, sebagaimana diuraikan dalam Makalah Konsep untuk pembentukan ADMM yang didukung pada Pelantikan ADMM di Kuala Lumpur pada 09 Mei 2006, yakni :

Pertama untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui dialog dan kerjasama dalam pertahanan dan keamanan.

Kedua, untuk memberikan bimbingan kepada para pejabat senior pertahanan dan dialog pejabat militer dan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan di dalam ASEAN dan mitra-ASEAN.

²² Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia <http://setnas-asean.id> diakses pada 27 September 2018, pk.00:07

²³Ibid

²⁴Center for Strategic & International Studies, No.25 (2011), “ASEAN Defence Industry Collaboration”, dalam <http://www.csis.org/isp/diig>, diunduh pada 12 Desember 2018

²⁵Tomotaka Shoji, “ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) and ADMM Plus: A Japanese Perspective”, (NIDS Journal of Defense and Security, 12 Desember 2018) hlm. 10-12

Ketiga, untuk mempromosikan rasa saling percaya dan percaya diri melalui pemahaman yang lebih besar tentang tantangan pertahanan dan keamanan serta peningkatan transparansi dan keterbukaan, dan

Keempat, untuk berkontribusi pada pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) sebagaimana ditetapkan dalam Bali Concord II dan untuk mempromosikan pelaksanaan Program Aksi Vientiane (VAP) di ASC.

Tujuan dari ADMM-Plus, sebagaimana diuraikan dalam *ADMM-Plus Concept Paper*, yang diadopsi oleh ADMM II, Singapura, 13-15 November 2007, adalah

Pertama, untuk memberi manfaat bagi negara-negara anggota ASEAN dalam membangun kapasitas untuk mengatasi tantangan keamanan bersama, sambil menyadari kapasitas yang berbeda dari berbagai negara ASEAN.

Kedua, untuk mempromosikan rasa saling percaya dan kepercayaan antara perusahaan pertahanan melalui dialog dan transparansi yang lebih besar.

Ketiga, untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui kerjasama dalam pertahanan dan keamanan, mengingat tantangan keamanan transnasional yang dihadapi kawasan ini.

Keempat, untuk berkontribusi pada terwujudnya Komunitas Keamanan ASEAN yang sebagaimana ditetapkan dalam *Bali Concord II*, pewujudan aspirasi ASEAN untuk mencapai perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kemakmuran di kawasan di mana negara-negara anggota ASEAN hidup berdampingan dengan satu sama lain dan dengan benua lain.

Kelima, untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Aksi Vientiane, yang menyerukan ASEAN untuk membangun ASEAN yang damai, aman dan makmur, dan untuk mengadopsi strategi hubungan

luar yang lebih terlihat ke luar dengan teman-teman dan Mitra Dialog²⁶.

Kerangka teoritis security community melihat hubungan internasional sebagai proses pembelajaran sosial, formasi identitas, yang dikendalikan dari transaksi, interaksi, dan sosialisasi. Mempromosikan stabilitas dan perdamaian regional melalui dialog dan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan dapat dikatakan sebagai pembelajaran sosial dan formasi identitas. Pembelajaran sosial disini mengacu pada bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat menyesuaikan diri dengan kerangka ADMM sehingga transfer informasi dapat mengoptimalkan perwujudan komunitas keamanan. Sedangkan bagi kepentingan formasi identitas, ADMM melalui budaya dialognya dapat menekankan identitas bersama yang meskipun beragam dan berprinsip non-interference.

Sementara untuk memberikan panduan pada negara-negara ASEAN mengenai bagaimana ASEAN Security Community dibentuk dan bagaimana mencapainya adalah juga salah satu proses pembelajaran sosial. Mempromosikan saling percaya dan kepercayaan diri melalui pemahaman yang lebih luas dari tantangan keamanan dan pertahanan, guna mencapai transparansi dan keterbukaan dan mendukung jalannya ASEAN Security Community (ASC) adalah bentuk dari sosialisasi guna memperkuat pertahanan di Kawasan Asia Tenggara.

KEPENTINGAN DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ADMM

Dalam kesempatan ini, penulis akan memaparkan mengenai diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia secara multilateral dalam kerangka ADMM. Bagi Indonesia,

²⁶ Official Website ASEAN <https://asean.org/asean-political-security-community/asean-defence-ministers-meeting-admm/> diakses pada 27 September 2018, pk. 00:36

ADMM memiliki dua arti strategis yakni pertama sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara khususnya dalam bidang pertahanan. Kedua, untuk menjalankan peranan sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara dari masuknya kepentingan-kepentingan pihak asing khususnya dalam bidang keamanan yang bila tidak dikelola dengan baik akan mengancam kepentingan nasional Indonesia.

Diplomasi pertahanan menjadi hal yang cukup signifikan bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam membentuk arsitektur keamanan di Asia Tenggara. Kondisi ini terkait dengan permasalahan yang dalam beberapa waktu terakhir mengganggu citra dan postur pertahanan Indonesia. Permasalahan yang mengganggu citra pertahanan Indonesia adalah kurang memadainya Alat Utama Sistem Persenjataan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan Indonesia. Indonesia yang dahulu menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara bahkan Asia, harus menerima kenyataan pahit saat ini secara kualitas dan kuantitas tertinggal dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kondisi ini tentu saja mengurangi kredibilitas Indonesia, khususnya terkait dengan peran sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini membuat Indonesia perlu untuk memperkuat kembali perannya di Asia Tenggara, khususnya dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, dalam pertemuan ADMM ke-5 pada Mei 2011 yang bertempat di Jakarta, hal ini terkait erat dengan eksistensi peran Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011.

ADMM menjadi sarana juga bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan dan mengembangkan kerja sama pertahanan diantara mereka maupun dengan kekuatan di luar kawasan. Pengembangan kerjasama pertahanan oleh Indonesia selain dimaksudkan untuk memperkuat CBM, juga ditujukan untuk

membangun dan memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia. Kerja sama pertahanan dalam bingkai diplomasi pertahanan Indonesia, kinerjanya akan lebih optimal di kawasan bila hal tersebut disertai dukungan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pertahanan sendiri, dengan dukungan kemampuan alutsista yang baik serta dengan adanya evaluasi kebijakan kerja sama pertahanan itu sendiri. Diharapkan melalui peningkatan kerja sama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan dapat terwujud.

Stabilitas kawasan dapat diciptakan dengan CBM yang diharapkan akan dicapai dalam ADMM dapat mengubah pattern of enmity (kecurigaan dan permusuhan) menjadi pattern of amity (persahabatan dan kepercayaan) dari negara-negara di dalam maupun di luar kawasan yang ikut berpartisipasi didalamnya. Dinamika kawasan di Asia Tenggara dalam konteks kekinian dengan munculnya enmity dan amity tersebut telah menunjukkan bahwa konsepsi regional complex yang dikemukakan oleh Barry Buzan perlu dikelola dengan baik agar tidak memunculkan dominasi dari pola enmity seperti saat sebelum ASEAN terbentuk.

Melalui kepercayaan yang terbangun sebagai hasil dari diplomasi pertahanan yang dilakukan dalam bingkai ADMM, Indonesia memiliki keleluasaan serta membuka peluang untuk memperkuat sistem pertahanan dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan mitra di kawasan maupun dengan mitra dari luar kawasan. Selain itu, ADMM dapat menjadi instrumen untuk memperkenalkan produk alutsista yang telah mampu diproduksi oleh Indonesia. Indonesia saat ini telah mampu memproduksi senjata serbu varian SS-1 dan SS-2, panser Anoa, serta Pesawat Patroli. Dalam ADMM Indonesia akan memiliki banyak kesempatan untuk menjelaskan mengenai

keunggulan dari produk-produk industri pertahanan Indonesia kepada negara lain. Dengan demikian maka kesempatan untuk membuka pasar atas produk industri pertahanan dalam negeri akan lebih luas. Pembukaan pasar industri pertahanan ini akan menjadi hal yang sangat strategis karena akan menjadi prasyarat bagi perkembangan industri pertahanan dalam negeri yang saat ini tengah menjadi perhatian untuk menunjang pembangunan sistem pertahanan Indonesia.

Dengan demikian, upaya-upaya diplomasi sangat penting dalam ADMM ini, terlebih peran Indonesia sebagai negara yang memimpin usaha-usaha perdamaian dan keamanan di wilayah ASEAN dan untuk lebih meningkatkan kerja sama penyelesaian semua konflik regional, kapasitas kesenjangan, dan mengkaji kemajuan kerja sama dalam keamanan maritim, kedokteran militer, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, operasi pemeliharaan perdamaian dan kontra-terorisme. Tidak dipungkiri bahwa ADMM bukan hanya untuk kepentingan secara eksternal yang kemudian harus dicapai oleh Indonesia didalamnya, namun juga kepentingan yang sifatnya domestik yakni keamanan nasional.

Tidak dipungkiri bahwa ADMM bukan hanya untuk kepentingan secara eksternal yang kemudian harus dicapai oleh Indonesia didalamnya, namun juga kepentingan yang sifatnya domestik yakni keamanan nasional. Keamanan nasional Indonesia mendapatkan beberapa tantangan terkait dengan permasalahan terorisme. Indonesia menjadi wilayah dimana aktivitas kelompok radikal yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas keamanan dengan melancarkan berbagai serangan baik terhadap simbol negara asing maupun simbol pemerintah Indonesia. Kesulitan utama yang kemudian dihadapi untuk mencegah dan menetralkan ancaman ini adalah pergerakan dari kelompok ini yang sering berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk membantu Indonesia dalam menangani masalah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dalam kerangka ADMM dimana dalam mekanisme ini, Indonesia melalui menteri pertahanan memiliki kesempatan untuk meyakinkan bahwa terorisme yang ada di Indonesia hanya dapat diatasi dengan kerjasama yang erat dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dilakukan secara bilateral serta akan mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan adanya mekanisme diskusi didalam ADMM tersebut.

PENCAPAIAN KEBERHASILAN ADMM

ADMM telah mengantongi beberapa prestasi yang telah dilakukan sejak didirikan pada tahun 2006. Kerja sama di sektor pertahanan ASEAN telah tumbuh dengan sangat baik, khususnya pada pekerjaan dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR) yang telah berkembang dengan pesat.

Para menteri Pertahanan ASEAN telah mengadopsi berbagai makalah konsep untuk memajukan kerjasama dalam HADR. Lokakarya lanjutan tentang Pendirian Pertahanan ASEAN dan kerjasama CSO dalam Keamanan Non-Tradisional dan Penggunaan aset militer ASEAN dan kapasitas dalam HADR serta latihan atas meja pada HADR selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan inisiatif ini.

Demikian pula, kerjasama dibidang operasi pemeliharaan perdamaian dan industri pertahanan telah bergerak cepat dengan pengadopsian Makalah Konsep tentang Pembentukan Jaringan Penjagaan Perdamaian ASEAN dan Kerjasama Industri Pertahanan ASEAN oleh ADMM ke-5 pada 2011. Inisiatif

pembentukan Program Interaksi Pertahanan ASEAN dan Kerangka Bantuan Logistik ADMM juga diadopsi oleh ADMM ke-7 pada tahun 2013, proses pelaksanaan inisiatif ini sedang berjalan.

Kerjasama dibidang *Peacekeeping Operation* (PKO) telah berkembang dengan pesat, antara lain dengan didirikannya *ASEAN Peacekeeping Centers Network* (APCN) yang merupakan *platform* kerjasama antar-*Peacekeeping Centers* di Negara-Negara Anggota ASEAN untuk saling berbagi informasi dan kapasitas.

Hingga saat ini, APCN telah melakukan 5 kali pertemuan, yaitu di Thailand pada tahun 2012, di Indonesia pada tahun 2013, di Kamboja pada tahun 2015, dan di Filipina pada tahun 2016, serta di Indonesia pada tahun 2017. Pertemuan-pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah untuk berbagi informasi mengenai kegiatan di PKC masing-masing, maupun menyepakati pelaksanaan pelatihan maupun kursus bersama, antara lain : *Pre-deployment Training* (PDT) di Indonesia tahun 2013; *UN Military Observer Course* (UNMOC) di Thailand pada tahun 2014; dan *Future Leaders Program (Exchange of Officers)* di Indonesia tahun 2015.

Selain APCN, pencapaian lain dari area kerja sama PKO adalah telah dilaksanakannya *ADMM-Plus EWG Peace Keeping Operation / Humanitarian Mine Action Exercise* atau Latihan bersama bertema PKO dan HMA di Pune, India, pada Januari 2016.

Area kerja sama lain yang mengalami kemajuan pesat ialah *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR). Berbagai pencapaian yang telah dihasilkan antara lain pembentukan *ASEAN Centre of Military Medicine* (ACMM) yang merupakan pusat koordinasi pemberian bantuan medis militer dalam penanganan bencana di kawasan; diadopsinya TOR dari

ASEAN Militaries Ready Group (AMRG) on HADR dan upaya untuk operasionalisasinya secara penuh, serta dilaksanakannya kegiatan *ADMM-Plus EWG Humanitarian Assistance and Disaster Relief / Military Medicine Joint Exercise* (AM-Hex) di Chonburi, Thailand, pada September 2016.

Area lain yang menjadi fokus utama Indonesia dalam kerja sama ADMM/ADMM-Plus adalah *Maritime Security/Counter Terrorism Exercise* di Brunei Darussalam dan Singapura pada bulan Mei 2016. Sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *ADMM-Plus Counter Terrorism Exercise* di Sentul, Bogor, pada bulan September 2013.

Selanjutnya pada kemajuan pesat kerjasama *Maritime Security* (MS) juga ditandai dengan dibentuknya *ADMM Direct Communication Link* (DCL), yang sekarang menjadi *ASEAN Direct Communication Infrastructure/ADI* yang merupakan jalur komunikasi cepat (*hotline*) antar Menteri Pertahanan ASEAN untuk merespon situasi darurat yang terjadi di laut, untuk meminimalisir adanya misinterpretasi dan eskalasi antar negara.

Inisiatif ADMM baru yang penting lainnya adalah pembentukan Tautan Komunikasi Langsung, yang diadopsi oleh ADMM ke-8 pada tahun 2014. Tautan ini, ketika dibentuk, akan menjadi kepercayaan praktis dan ukuran pembangunan keamanan yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama tanggap cepat dalam situasi darurat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan maritim. Pekerjaan ini juga sedang bergerak untuk membentuk tautan komunikasi langsung.

Trilateral Maritime Patrol (TMP) sebuah kerjasama baru oleh Malaysia, Filipina dan Indonesia (MALFINDO) telah menunjukkan hasil di wilayah kepentingan maritim mereka. Dan belum lama ini juga ada pembentukan Inisiatif pertukaran informasi antar badan

intelijen anggota negara ASEAN yang disebut Inisiatif Our Eyes.

KEBERHASILAN INDONESIA DALAM INISIATIF KERJASAMA KEAMANAN NON TERORIS

Selat Malaka menjadi jalur distribusi minyak menuju kawasan Asia Timur yang merupakan wilayah yang diperkirakan memiliki ekonomi paling progresif di dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis, kebutuhan energi negara-negara di Asia Timur diperkirakan meningkat pada dekade mendatang.

Atas dasar menjaga keamanan di sekitar Selat Malaka, maka pada tanggal 20 Juli 2004 di Batam diresmikan “Malsindo Trilateral Coordinated Patrol” yang merupakan kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara antara Malaysia-Singapura-Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat lebih meningkatkan hubungan kerjasama antara ketiga negara khususnya antara masing-masing angkatan laut dalam menjaga keamanan kawasan Selat Malaka.

Malsindo dengan sistem kerja Indonesia, Malaysia, dan Singapura melakukan patroli terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagai informasi antara kapal dan *Monitoring and Action Agency* (MAA)²⁷.

Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) yang 192 diluncurkan pada 20 Juli 2004 dan dalam pelaksanaan patrolinya, negara Indonesia, Malaysia dan Singapura melakukan patroli terkoordinasi dengan saling memfasilitasi berbagai informasi. Terakhir, MSP Intelligence Exchange Group (MSP-IEG) dibentuk pada tahun 2006 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai salah satu upaya untuk mendukung patroli laut dan udara melalui Patroli Sistem Informasi Selat Malaka yang digunakan dengan

mengoptimalkan aset udara dan laut di tempat kejadian untuk menyampaikan informasi dari insiden yang sedang berlangsung dan untuk semua pemantauan yang dilakukan setiap waktu. Dengan dijalankannya operasi Malsindo pada tahun 2004 statistik memperlihatkan bahwa perompakan yang terjadi di kawasan Selat Malaka mulai menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil dari kerjasama ketiga negara pantai tersebut pada tahun 2004 menghasilkan tingkat perampokan bersenjata terus menerus turun hingga mencapai tidak lebih dari 50 insiden penyerangan. Tercatat selama kurun waktu 2004-2010 setelah dibentuknya Malsindo insiden kejahatan perampokan bersenjata menurun drastis.

Dari 2004 mulai terbentuknya malsindo tercatat ada 38 insiden yang menurun menjadi 12 insiden pada tahun berikutnya. ICC melaporkan bahwa jumlah serangan telah menurun karena peningkatan patroli oleh negara-negara pantai sejak juli 2005²⁸ dan terus menerus menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2013 IMB bahkan melaporkan ancaman perampokan laut di Selat Malaka hampir nol. Meskipun demikian, perlu dicatat masih adanya ancaman terorisme dan kejahatan laut lainnya yang perlu diwaspadai. Keberhasilan tiga negara pantai dalam mengamankan Selat Malaka melalui patroli terkoordinasi selain dapat menurunkan angka pembajakan di perairan Selat Malaka juga membuat kesuksesan patroli terkoordinasi ini diakui oleh negara Asia Tenggara lainnya, sehingga beberapa negara Asia Tenggara ada yang ingin bergabung sebagai tim peninjau dalam patroli terkoordinasi.

²⁷Website Kementerian Pertahanan Singapura <http://www.mindef.gov.sg>. Diakses pada 01 Januari 2019 pk. 15:39

²⁸Website resmi ICC Commercial Crime Service <http://www.icc-ccs.org> diakses pada 1 Januari 2019 pk. 20:07

KESIMPULAN

ASEAN (*The Association of Southeast Asia Nation*) merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, dengan semangat untuk membawa kesejahteraan bagi negara-negara anggotanya. Kerjasama itu diwujudkan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dimana dalam proses kerjasama itu banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dinamis dan itu dapat berpengaruh pada keefektifan sebuah organisasi. Berkembangnya interaksi regional di kawasan Asia Tenggara membawa berbagai isu-isu baru yang berpengaruh langsung dalam segala mekanisme yang harus dijalankan oleh ASEAN. Salah satu isu yang akan dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan isu keamanan, gerakan terorisme dan inisiatif yang akan dibentuk dibawah rencana dari aksi pilar politik dan keamanan ASEAN yaitu ASEAN DEFENSE MINISTERS MEETING (ADMM).

ADMM merupakan platform kerja sama antar- Menteri Pertahanan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan Confidence Building Measures (CBM) serta menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan melalui dialog dan kerja sama praktis

Untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional, beberapa negara telah merumuskan paradigma baru dengan mencanangkan konsep kerjasama dalam rangka penanggulangan teror. Sebagai langkah untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan teroris, salah satunya diwujudkan dalam latihan bersama Penanggulangan Terorisme di bawah payung ASEAN. Keberadaan ADMM menjadi salah satu penopang bagi terbangunnya salah satu pilar ASEAN Community yang akan diterapkan pada tahun 2015 yakni ASEAN Political and Security Community (APSC). Salah satu dasar dalam pembentukan sebuah komunitas dalam kawasan adalah rasa

saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan keamanan, unsur utama dalam hal ini adalah rasa saling percaya bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh sebuah negara bukan ditujukan untuk mengancam negara lain dalam komunitas tersebut. Maka dalam hal ini ADMM memainkan peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar ASEAN Community dalam bidang politik dan keamanan.

Para Menteri sepakat untuk melakukan pendekatan untuk memerangi tantangan terorisme atau ekstremisme, dan mendorong kerjasama berbasis sharing inteligen yang lebih kuat guna mencegah gerakan dan pendanaan teroris serta mengembangkan dan meningkatkan kerja sama baik dari pemerintah hingga masyarakat sipil dan institusi lain untuk mempromosikan moderasi dan toleransi dalam memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan.

Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu mengusulkan kerja sama berbasis intelijen yang diberi nama "*Our Eyes Initiative*". Pada Inisiatif *Our Eyes* ini, Setiap negara anggota akan membuat unit baru untuk berbagi informasi intelijen dan bertanggung jawab untuk menjaga komunikasi secara teratur terhadap informasi dibawah kerjasama intelijen ini. Hal ini disambut baik oleh negara-negara yang hadir pada forum ADMM-Plus dan disegerakan melakukan soft launching pada awal tahun 2018.

Menhan RI meyakini hubungan yang baik ini akan terus ditingkatkan melalui komunikasi dan dengan adanya saling interaksi antara kedua negara. Selain itu dengan adanya pertemuan yang ketiga kali ini, ikatan kerjasama antara kedua negara akan semakin erat sehingga dapat membuka peluang-peluang baru guna peningkatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Menhan RI berharap, hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan akan dapat memberikan sumbangan yang positif tidak saja bagi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga bagi terpeliharanya keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan serta tentu saja kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia sendiri, ADMM menjadi salah satu mekanisme yang sangat efektif dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan forum multilateral yang mempertemukan sesama negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan melalui mekanisme ADMM plus. Indonesia memanfaatkan berbagai dialog konstruktif yang digelar untuk menyampaikan berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik yang berasal dari dalam kawasan, dari dinamika keamanan global serta dinamika keamanan domestik yang ada di Indonesia.

Maka dari kesepakatan Our Eyes itulah yang dapat membuat Indonesia mendapatkan perhatian untuk dapat menjadi pengaruh dalam bidang keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya pada bidang pemberantasan terorisme.

Daftar Pustaka

Buku

Burchill, Scott. Andrew Linklater, 2008, Teori Teori Hubungan Internasional, Bandung: Nusa Media.

Mochtar Mas'ood, 1994 Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES.)

Morgenthau, Hans. 1973, Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace, New York: Knopf.

S.L Roy, 1995, Diplomasi, Jakarta, PT. Raja Persada.

Supriyatno, M. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

Anwar, S. 2014. Peran Diplomasi Pertahanan Dalam Mengatasi Tantangan di Bidang Pertahanan. Jurnal Pertahanan : Diplomasi Pertaanan Volume 4 No. 2.

Center for Strategic & International Studies, No.25 (2011), "ASEAN Defence Industry Collaboration", dalam <http://www.csis.org/isp/diig>

Hidayat, S. 2014. Diplomasi Pertahanan Indonesia : Amalgam Militer-Sipil. Jurnal Pertahanan : Diplomasi Pertahanan, Volume 4 No. 2.

Idjang Tjarsono, Isu Terorisme dan beban ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara pasca runtuhnya WTC-AS. Dalam Jurnal Transnasional Vol. 4 No.01, Juli 2012. Pekanbaru

M. Saeri, 2012, Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatic. Dalam Jurnal Transnasional Vol. 03 No. 02, Pekanbaru, Februari 2012.

R.P Barston, Modern Diplomacy, Fourth Edition, Routledge: Taylor and Francis Group, London and New York, 2013, hlm. 1

Internet

Aksi teror oleh ASG
<http://www.nctc.gov/site/groups/asg.html> diakses pada tanggal 22 Agustus 2018, pukul 22:48

Gaddafi son wants to surrender to The Hague – NTC News
<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2798352/posts> diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 pk. 13.32

Official Website ASEAN
<https://asean.org/asean-political-security-community/asean-defence-ministers-meeting-admm/> diakses pada 27 September 2018, pk. 00:36

Website Resmi Kemhan RI
<https://www.kemhan.go.id/2013/09/25/latihan-bersama-penanggulangan-terorisme-negara-negara-asean-plus.html> diakses pada 25 Januari 2019 pkl. 13:48

Website resmi ICC Commercial Crime Service
<http://www.icc-ccs.org> diakses pada 1 Januari 2019 pkl. 20:07

Website News The Straits Times Indonesia proposes ‘mini-interpol’ plan to boost Asean counter-terrorism efforts
<http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-proposes-mini-interpol-plan-to-boost-asean-counter-terrorism-efforts> 14/12/2018 12:54